

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.1.1 Isu – isu internal

a. Sumber Daya Manusia

Secara kuantitatif, jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, berjumlah 97 orang, yang tersebar pada masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, sebagai instansi teknis, kondisi eksisting menunjukkan bahwa jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan teknik relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan latar belakang non teknik. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA sehingga jauh dari kepemilikan kualifikasi teknis di bidang perhubungan. Tabel di bawah ini menunjukkan persebarannya tersebut:

Tabel 3.1
Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status	Persebaran			Jml
		Kantor Dishub Kominfo	Terminal	Pkb	
1	PNS	56	11	14	81
2	Non PNS	10	6	0	16
Jumlah		66	17	14	97

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati

Tabel 3.2
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	S2	S1/ DIV	DIII	DII	SLTA	SLTP	SD	Total
Jumlah	12	26	5	6	44	3	1	84

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati

b. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pati

Dengan terbatasnya anggaran Pemerintah Kabupaten Pati sehingga pertumbuhan anggaran Dishub naik turun. Sementara tuntutan akan layanan jasa transportasi sangat dinamis sesuai perkembangan teknologi transportasi. Berikut prosentase perbandingan total APBD kabupaten Pati dengan total anggaran Dishubkominfo 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 3.3
Plafon Anggaran Belanja Dishubkominfo

Tahun	Total APBD Kab. Pati	Total Anggaran Dishubkominfo	Persentase
2015	2.458.477.453.000,-	10.460.922.000	0,43%
2016	2.811.447.742.000,-	11.566.516.000	0,41%

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati

c. Masih kurangnya prasarana/fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Tabel 3.4
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota (Perambuan)
Yang Dibutuhkan Dan Terpasang

No.	Status	Dibutuhkan	Terpasang	Kondisi		Ket
				Baik	Rusak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Nasional	257	173	164	9	-
2	Jalan Propinsi	1093	546	531	15	-
3	Jalan Kabupaten	2690	1795	1739	56	-

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati

Tabel 3.5
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota (Marka)

No.	Status	Dibutuhkan (Km)	Sudah dilengkapi (Km)	Kondisi		
				Baik %	Sedang %	Pudar %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Nasional	41	41	90	10	0
2	Jalan Propinsi	103	60	80	10	10
3	Jalan Kabupaten	813	520	80	10	10

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati

Tabel 3.6
Data Rambu Menurut Jenisnya

No.	Status	Peringatan	Larangan	Perintah	Petunjuk	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jalan Nasional	108	40	25	-	173
2	Jalan Propinsi	479	29	38	-	546
3	Jalan Kabupaten	1596	104	95	-	1795

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati

Tabel 3.7
Data Jumlah Shelter/Halte

No	Status	Dengan bangunan : shelter/halte bus (buah)		Tanpa bangunan / hanya rambu (buah)	
		Dibutuhkan	Terpasang	Dibutuhkan	Terpasang
(1)	(2)	(3)		(4)	
1	Jalan Nasional	25	6	0	0
2	Jalan Propinsi	32	5	0	0
3	Jalan Kabupaten	53	13	0	0
Jumlah					

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati

Tabel 3.8
Data Fasilitas Pejalan Kaki Yang Dibutuhkan Dan Terpasang

No	Fasilitas	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Zebra Cross	439	205	205
2	Zona Selamat Sekolah (Zoss)	17	2	2
3	Jembatan Penyeberangan	0	0	0
Jumlah				

Sumber : Dishubkominfo Kab. Pati

- d. Menurunnya fungsi fasilitas pendukung terminal tipe C oleh sebab orientasi pengembangan fasilitas terminal bersifat profit guna mencapai target pendapatan terminal;

3.1.2 Isu-isu Eksternal

a. Ekonomi

Investasi yang rendah di sektor pengangkutan tercermin dari masih tingginya tingkat inflasi di sektor pengangkutan yaitu sebesar 4,08 persen pada tahun 2013, hal ini sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.9
Laju inflasi Kabupaten Pati menurut Lapangan Usaha

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Pengangkutan	6,29	3,78	5,17	4,08	3,62
Pengangkutan	5,13	3,30	5,73	4,24	3,13
1. Angkutan Rel	14,09	16,78	14,46	1,31	3,39
2. Angkutan Jalan Raya	7,22	4,10	9,12	4,79	3,81
3. Angkutan Laut	5,27	0,92	3,40	2,68	2,39
4. Angkutan Sungai, Danau	5,58	7,08	2,82	6,28	5,03
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan	3,14	11,08	16,83	12,45	5,75

Sumber: Pati Dalam Angka 2014

b. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan

Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat dari kurang disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada kendaraan, terbatasnya rambu dan fasilitas keselamatan di jalan.

Tabel dibawah ini menunjukkan banyaknya kecelakaan lalu lintas selama tahun 2011-2015 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Banyaknya Kecelakaan Lalu Lintas
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Jumlah Kejadian	Jumah Korban			
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	933	179	39	1062	484.000.000
2012	905	172	62	1097	630.805.000
2013	857	153	18	1033	473.625.000
2014	840	130	21	988	423.795.000
2015	898	147	16	1012	497.850.000

Sumber : Kepolisian Negara RI Resort Pati

c. Lemahnya *Law Enforcement*, ditandai dengan naik turunnya kasus pelanggaran lalu lintas dalam kurun 3 tahun terakhir

Tabel 3.11
Data Kasus Pelanggaran Lalu Lintas

No	Uraian	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Tilang (Kjd)	14.107	14.483	11.824
2	Dikirim ke Pengadilan (Kss)	14.107	14.483	11.824
3	Terdakwa Hadir (Org)	13.957	14.298	11.709
4	Terdakwa Tidak Hadir (Org)	150	185	115
5	Denda (Rp)	Rp 210.907.500	Rp 284.759.000	Rp 236.571.000
6	Perkara Yang terselesaikan (Kss)	14.107	14.483	11.824

- d. Tersedianya jaringan layanan angkutan umum yang melayani seluruh pelosok kabupaten namun ada beberapa trayek layanan angkutan perdesaan yang tidak lagi dioperasikan sejalan perubahan pemindahan moda angkutan umum ke moda sepeda motor;

Dari uraian diatas maka permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dituangkan dalam tabel 3.12 tentang pemetaan permasalahan untuk penentu prioritas dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.12
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentu Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi sebagai fungsi roda perekonomian antar wilayah dan kawasan strategis di Kabupaten Pati	Berkurangnya kapasitas jalan sebagai akibat pertumbuhan lalu lintas sebanding dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan di Kabupaten Pati	Menurunnya tingkat pelayanan jalan sebagai dampak bertambahnya titik lokasi kemacetan dan daerah rawan lalu lintas jalan di wilayah Kabupaten Pati
			Menurunnya jumlah kendaraan angkutan umum yang laik jalan sehingga kerap kali terjadi konflik lalu lintas jalan oleh sebab kondisi kendaraan yang tidak layak.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 merupakan gambaran keadaan yang akan diwujudkan di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih 2017-2022 beserta arah tindakan yang dipersiapkan untuk mencapainya. Visi dan misi daerah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran sebagai gambaran keadaan yang akan dicapai. Selanjutnya visi dan misi diindikasikan melalui tolok ukur tertentu yang merepresentasikan capaian keberhasilan dampak pembangunan. Visi bupati – wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 adalah:

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik”

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi dirumuskan untuk mendukung perwujudan unsur visi. Keterkaitan misi dan visi kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan yang diberikan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dinas juga mempunyai fungsi

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dalam hal ini bidang perhubungan.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati maka menjalankan misi yang ke 7 yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah. Capaian visi meningkatnya kesejahteraan masyarakat harus didorong dengan pertumbuhan ekonomi diwilayah Kabupaten Pati sehingga peran dari perhubungan adalah mendukung penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai menghubungkan daerah produktif dengan konsumtif serta terciptanya kelancaran pendistribusian hasil produksi tersebut.

Mobilitas yang lancar juga didukung dengan pelayanan perhubungan baik administrasi maupun teknis guna menjamin keselamatan dan ketertiban berlalu lintas dijalan raya. Berjalannya fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kondisi mobilitas diatas yang didukung juga dengan tenaga yang ahli dan terampil dibidang perhubungan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan kebutuhan jasa perhubungan secara dinamis perlu disikapi dengan suatu regulasi yang mengatur tentang kewenangan pelaksanaan operasional, pengawasan serta pengendalian. Secara keseluruhan substansi regulasi tersebut diatas dapat terukur, terawasi dan terkontrol kinerjanya secara rentan kendali baik dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten. Untuk itu dibutuhkan suatu rumusan perencanaan pembangunan yang sinergi dan harmonis antara pemerintah pusat melalui Renstra Kementerian, pemerintah propinsi Renstra Propinsi dan pemerintah kabupaten melalui Renstra Kabupaten yang kemudian dijabarkan kedalam Renstra tiap – tiap perangkat daerah selaku institusi pelaksana teknis diwilayah kabupaten. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati adalah bagian dari perangkat daerah di pemerintah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan yang diberikan kepada daerah. Maka dalam

merumuskan arah kebijakan teknik pembangunan mengacu pada prosedur teknis kementerian perhubungan.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana yang menjangkau masyarakat dan wilayah indonesia
3. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa transportasi darat yang memiliki kualitas prima didalam manajemen produksi.
4. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya
5. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan.
6. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.

Adapun sasaran kementerian perhubungan cq Direktorat Jendral Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pemulihan fungsi saran dan prasaran transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional
2. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya manusia dan peraturan per-undang-undang/regulatory reform) di bidang transportasi darat dalam rangka memlberikan peluang yang sama se-cara adil dan demokratis kepada masyarakat untuk ber-peranserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan, tertinggal, ka-wasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai.
4. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat; pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (kabupaten Pati). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah cq Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dengan Pemerintah Pusat cq Direktorat Jendral Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan yaitu : “meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi. Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi.
2. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat.
3. Mengendalikan polisi emisi gas buang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pati :

Meningkatkan ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi; terpenuhinya kebutuhan prasarana keselamatan transportasi jalan. Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan mentaati rambu lalu lintas jalan serta pemahaman tata tertib berlalu lintas di jalan raya akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah cq Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dengan kegiatan pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan pembinaan ketertiban lalu lintas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Setiap pembangunan suatu daerah tidak lepas dari acuan induk dokumen rencana tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis. Untuk itu dalam pembangunan bidang perhubungan harus memperhatikan dan memperhitungkan dokumen tata ruang wilayah. Sehingga dalam menentukan titik lokasi pembangunan simpul transportasi seperti; terminal, pelabuhan, bandara serta pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan lainnya harus memperhatikan kaidah-kaidah tata ruang wilayah yang sudah dibakukan dalam bentuk peraturan daerah tentang perihal tersebut. Selain itu pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan juga memperhitungkan kajian lingkungan strategis sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya tidak berdampak buruk pada masyarakat luas akan tetapi akan menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian tersebut di antaranya adalah studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta analisis dampak lalu lintas (Andalalin).

Sejalan dengan aktifitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, provinsi dan kejadian bencana alam sehingga kebijakan pengembangan struktur ruang Kabupaten Pati terkait dengan pembangunan bidang perhubungan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati tahun 2010 – 2030, melalui program utama pada pembangunan jangka menengah pertama yaitu perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi jalan dengan;

- a. Pengembangan angkutan umum
 1. Studi kelayakan sistem angkutan
 2. Penyediaan pemberhentian untuk kendaraan angkutan umum bus maupun non bus yang memadai
- b. Pengembangan sarana transportasi;
 1. Pembangunan terminal tipe A
 2. Peningkatan terminal tipe C
 3. Pembangunan terminal asal tujuan (origin-destination/OD)

Analisis KLHS pada Renstra Perangkat Daerah 2017-2022 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dan merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Isu strategis Kabupaten Pati terkait dengan pembangunan bidang perhubungan sebagai berikut;

1. Permasalahan sistem transportasi di wilayah Kabupaten Pati didominasi oleh transportasi darat yaitu jalan raya. Fungsi-fungsi jaringan jalan yang terdapat di kabupaten Pati yaitu fungsi arteri primer, jaringan jalan ini menghubungkan Kabupaten Pati dengan kota-kota besar lain seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, dan lain sebagainya. Jaringan jalan tersebut yang melalui Kabupaten Pati terutama wilayah Kecamatan Margorejo, Pati, Juwana dan Kecamatan Batangan. Fungsi kolektor primer, jaringan jalan ini menghubungkan wilayah Kabupaten Pati dengan wilayah Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dengan Kabupaten Grobogan. Fungsi kolektor sekunder, jaringan jalan ini berfungsi menghubungkan ibu kota Kabupaten Pati dengan kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Pati, antar fungsi pengawasan seperti kawasan industri, perdagangan dan pemukiman. Fungsi lokal primer, jaringan jalan ini menghubungkan antara pusat kecamatan dengan pusat-pusat diperdesaan dan sekitarnya. Selain itu telah tersedia angkutan umum yang terdapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten pati yaitu terdiri atas 16 trayek angkutan perdesaan dengan jumlah armada 309 kendaraan.
2. Potensi perkembangan wilayah kabupaten pati didukung oleh letak wilayah kabupaten pati yang sangat strategis yaitu dilewati jalur transportasi darat nasional pantura yang menghubungkan kota-kota besar dipesisir utara Jawa yaitu Jakarta-Semarang-Surabaya. Keberadaan jalur tersebut memberikan peluang besar bagi kabupaten pati untuk lebih berkembang. Terletak pada kawasan pertumbuhan cepat yaitu sebagai koridor perkotaan dipantai utara bagian timur yang bertumpu pada pengembangan sektor industri, perikanan dan pertanian, berperan penting sebagai outlet ke dan dari Kalimantan. Terletak pada jalur strategis yang secara langsung berhubungan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara. Kondisi tersebut akan

memberikan potensi yang besar bagi wilayah Kabupaten Pati yaitu memperlancar kegiatan ekonomi di Kabupaten Pati. Diataranya yaitu aktifitas industri, perikanan, pertanian dan perkebunan. Disamping itu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan kota-kota di kabupaten Pati. Untuk mendukung perkembangan wilayah kabupaten pati maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 telah disebutkan pengaruh Kebijakan Rencana dan Program (KRP) pembangun berkelanjutan perhubungan terhadap lingkungan hidup diantaranya adalah;

Hasil overlay kegiatan dalam program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang signifikan berdampak lingkungan dengan Peta Rawan Bencana Banjir, Kekeringan, dan longsor adalah sebagai berikut;

1. Rencana lokasi pembangunan Pangkalan truk di Desa Muktiharjo berada pada daerah dengan tingkat kerawanan bencana banjir dan longsor yang rendah, dan bencana kekeringan sedang. Sehingga tidak memiliki perkiraan resiko bencana yang besar, tetapi tetap perlu mengatasi ancaman kekurangan air.
2. Rencana lokasi pembangunan Terminal Tipe C di Desa Kayen berada pada daerah dengan tingkat kerawanan bencana banjir dan kekeringan sedang, dan bencana longsor rendah. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah meminimalisir ancaman banjir dan mengatasi ancaman kekurangan air.
3. Adapun rencana lokasi pembangunan Terminal Angkutan Barang di Desa Raci berada di lokasi rawan bencana banjir rendah di bagian utara dan tinggi bagian selatan, yang berarti memiliki ancaman bencana banjir yang tinggi di bagian selatan, sehingga dibutuhkan rekayasa sipil teknis tertentu. Untuk hasil overlay dengan peta rawan bencana kekeringan masuk kategori sedang, yang berarti ada ancaman kekurangan air, dan rawan bencana longsor rendah.

Dari hasil telaah pengaruh KRP PJMD terhadap kondisi lingkungan hidup, dirumuskan alternatif pengelolaan lingkungan untuk penyempurnaan kebijakan, rencana dan program RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang didasarkan pada upaya mitigasi atas potensi dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD. Alternatif penyempurnaan KRP pembangun berkelanjutan perhubungan sebagai berikut :

- KRP Berdampak : Program pembangunan sarana prasarana perhubungan
- Analisis : Pembangunan berada lokasi yang telah sesuai kemampuan lahannya, tetapi harus memperhatikan kelestarian sumberdaya air, menghindari alih fungsi lahan pertanian serta meminimalkan pencemaran lingkungan.
- Alternatif Mitigasi : Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem, dengan uraian mitigasi sebagai berikut:
 - Meminimalisir potensi kawasan rawan bencana
 - Konservasi sumberdaya air di sekitar Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - Reboisasi sekitar sarana dan prasarana perhubungan
 - Pengaturan mobilisasi alat dan bahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
 - Pelibatan masyarakat dalam proses sarana dan prasarana perhubungan
- Rekomendasi : Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan dengan kegiatan utama: Pembangunan Terminal Kayen, Pangkalan Truk

dan Terminal Angkutan Barang harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya air dan menghindari pencemaran air, tanah dan udara.

- KRP Draft : Berdasarkan Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan pada RPJMD, untuk Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan, dengan target kinerja : Persentase ketersediaan prasarana perhubungan dengan indikasi kegiatan utama Pembangunan Terminal Kayen, Pangkalan Truk dan Terminal Angkutan Barang.

- Integrasi : Pada **Renstra DISHUB** harus ada kegiatan :
 1. Pembangunan sarpras perhubungan harus sesuai dengan analisa dampak lalu lintas yang ditimbulkan.

Pada **Renstra DLH** harus ada kegiatan :

1. Pembangunan IPAL
2. Penghijauan di sekitar tapak
3. Penyediaan RTH

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Pati pada tahun 2017-2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Perhubungan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Kriteria yang diterapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Dinas Perhubungan Kabupaten Pati yaitu: (i) Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Menjadi kewenangan Dinas Perhubungan; (iii) Mendesak diamanatkan oleh Pemerintah/Kementrian/Lembaga atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

a. Kelemahan Internal

- Terbatasnya jumlah SDM bidang perhubungan akan mempengaruhi capaian kinerja Dinas. Minimnya jumlah prasarana lalu lintas jalan serta kurangnya dukungan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja Dinas;
- Menurunnya kualitas pelayanan prasarana jalan yang ada di jalur-jalur utama, terutama akibat angkutan dengan muatan dan dimensi berlebih (*overload* dan *oversize*) dan rendahnya alokasi dana pemeliharaan.
- Belum optimalnya penerapan manajemen rekayasa lalu lintas berdasarkan hasil kajian analisis dampak lalu lintas;
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas pada jalan-jalan utama yang menyebabkan terjadinya tundaan/delay pada ruas-ruas jalan dalam kota;
- Jumlah supply angkutan umum yang tidak sesuai dengan *demand*, sehingga menuntut persaingan yang ketat antar operator angkutan umum sehingga seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas dan menciptakan kesemrawutan;
- Masih terpusatnya kegiatan perdagangan, perkantoran dan jasa di kawasan dalam kota dan terbatasnya kemampuan pemerintah maupun pihak swasta dalam menyediakan lahan parkir sehingga masih banyak penggunaan parkir di badan jalan yang menyebabkan berkurangnya kapasitas ruas jalan;

Permasalahan yang terkait dengan aspek dana antara lain :

- Gap yang signifikan antara jumlah dana yang teralokasi untuk penanganan masalah transportasi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
- Masih rendahnya kontribusi pihak swasta dalam melakukan investasi terutama dalam pengadaan prasarana transportasi.

Permasalahan yang terkait dengan aspek manajemen antara lain :

- Masih belum lengkapnya perangkat acuan yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan prasarana transportasi baik norma, standar, pedoman maupun manual;
- Masih belum intensnya koordinasi antar instansi maupun antar Pemerintah Daerah sehingga dalam beberapa aspek menimbulkan adanya perbedaan persepsi atau kebijakan.

b. Kekuatan Internal

Dalam RUJTJ dan RTRW sudah diprogramkan pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan baik simpul transportasi maupun fasilitas keselamatan lalu lintas jalan. Selain itu pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan juga memperhitungkan kajian lingkungan hidup strategis sehingga dalam pelaksanaan operasionalnya tidak berdampak buruk pada masyarakat luas akan tetapi akan menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Tantangan Lingkungan Eksternal

- Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada klausul pasal yang mengatur tentang pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan sehingga mengurangi langkah cepat Dinas Perhubungan Kabupaten dalam penataan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan;
- Kurang patuhnya pengguna jalan terhadap peraturan tata tertib berlalu lintas di jalan raya
- Meningkatnya target pendapatan Dishub akan berpengaruh terhadap layanan kinerja secara menyeluruh terutama pada pelayanan langsung masyarakat.
- Pendelegasian tugas dan fungsi bidang perhubungan sesuai dengan kewenangan daerah otonom harus dikoordinasikan dengan instansi terkait baik bersifat horisontal maupun vertikal.
- Kurangnya ketersediaan tenaga trampil dan ahli di bidang perhubungan

d. Peluang Ekternal

- Kebijakan nasional menjadikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan menjadi prioritas nasional, sehingga memaksa daerah untuk memasukkannya menjadi prioritas pembangunan daerah.
- Kabupaten Pati merupakan segmen dari lintas jalur pantura sehingga volume lalu-lintas baik angkutan orang maupun barang sangat tinggi, untuk itu perlunya ketersediaan terminal angkutan penumpang maupun terminal angkutan barang.
- Berlakunya Permenhub Nomer 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan regulasi terkini yang mengatur tentang kesetaraan antara angkutan online dengan angkutan reguler sehingga dapat menekan tingkat kesenjangan operasional pelayanan.
- Penyelenggaraan diklat teknis perhubungan oleh Kementerian Perhubungan memberi kesempatan kepada Aparatur Perhubungan di Daerah untuk mengikuti pelatihan tersebut guna peningkatan profesionalitas kinerja pelayanan perhubungan yang lebih baik.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dengan mendasarkan tugas dan fungsi, hasil telaah visi dan misi kepala daerah, hasil telaahan pada rencana strategis Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta kajian terhadap RTRW dan lingkungan hidup strategis sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana transportasi di wilayah pemerintah Kabupaten Pati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan transportasi publik yang murah, aman dan nyaman serta menjangkau seluruh pelosok kabupaten secara berkesinambungan dan ramah lingkungan.